



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa 24 September 2024
Waktu	: 13.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025; 2. Isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc, Zaqki Zachariyaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 35 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Kepala Badan Pelaksana BPKH beserta jajaran; 3. Ketua Dewan Pengawas BPKH beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.05 WIB. Rapat di skors pukul 16.15 dan dibuka kembali pada pukul 17.05 WIB.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Para Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

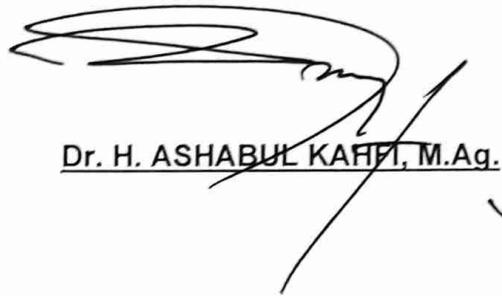
Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana BPKH membahas "**Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2025**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan BPKH mengenai RKAT tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Dana kelolaan sebesar Rp188,86 triliun.
 - b. Nilai Manfaat sebesar Rp12,89 triliun.
 - c. Biaya Pengeluaran Operasional BPKH sebesar Rp426 miliar.
 - d. Program Kemaslahatan sebesar Rp240,40 miliar.
 - e. Distribusi Nilai Manfaat kepada jemaah tunggu melalui rekening virtual (*virtual account*) sebesar Rp4,4 triliun.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Dewan Pengawas BPKH untuk melakukan reuiu atas rincian RKAT tahun 2025 dan melaporkan hasilnya kepada Komisi VIII DPR RI.
3. Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk memaksimalkan capaian target Nilai Manfaat dan jumlah pendaftar haji baru tahun 2025.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk memastikan pengelolaan Keuangan Haji yang berkelanjutan melalui peningkatan Nilai Manfaat dari aktivitas investasi di Arab Saudi dan di dalam negeri, serta efisiensi operasional.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memastikan penyediaan mata uang USD dan SAR untuk keperluan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2025 sesuai dengan kurs yang berlaku.
 - b. Mengoptimalkan kerja sama dengan Kementerian Agama RI dalam melakukan sinkronisasi data jemaah haji melalui Siskohat dan Siskopatuh.
 - c. Meningkatkan besaran alokasi program kemaslahatan bidang pelayanan ibadah haji.
 - d. Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan biaya operasional BPKH.
 - e. Memaksimalkan sosialisasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan perhajian untuk mengendalikan pembatalan pendaftar haji.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.25 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,



Dr. H. ASHABUL KAFFI, M.Ag.